



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	21
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;2. Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); dan4. Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).
Hari, Tanggal	:	Kamis, 12 Desember 2019
Pukul	:	13.20 - 21.40 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Ketua Rapat	:	SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	:	Membahas: <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi dalam Menghadapi Musim Tanam;

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Tani;
dan
3. Lain-lain.

Anggota DPR yang Hadir : 31 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

F-PDIP

1. SUDIN, S.E. (KETUA)
2. H. SUNARNA, S.E., M.Hum.
3. Drs. I MADE URIP, M.Si.
4. Ir. EFFENDI SIANIPAR
5. ONO SURONO, S.T.
6. H. YADI SRIMULYADI
7. VITA ERVINA, S.E., M.Si.
8. Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.
9. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
10. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.

F-PG

1. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
2. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.M.
3. A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA,
S.H., M.H.
4. Ir. ICHSAN FIRDAUS
5. BUDHY SETIAWAN
6. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
7. ALIEN MUS

F-GERINDRA

1. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO,
M.M.
2. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
3. Ir. SUMAIL ABDULLAH
4. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI
THOHARI, DESS., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. KHALID, M.M.

F-NASDEM

1. H. SULAEMAN L. HAMZAH
2. Hj. SRI WULAN, S.E.
3. Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.
4. YESSY MELANIA, S.E.

F-PKB

1. H. MUHTAROM, S.Sos.
2. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.
3. FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.

4. EDWARD TANNUR, S.H.

F-PD

1. Dr. SUHARDI DUKA, M.M.
2. Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.
3. MUSLIM, S.HI., M.M.
4. BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.

F-PKS

1. drh. H. SLAMET
2. Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
3. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
4. H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
5. Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.

F-PAN

1. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.
2. HAERUDIN, S.Ag., M.H.
3. FACHRYPAHLEVI KANGGOASA, S.E.
4. SLAMET ARIYADI, S.Psi.

F-PPP

1. K. H. ASEP A. MAOSHUL AFFANDY, M.Pd.I.
2. EMA UMIYATUL CHUSNAH

Hadir Undangan:

1. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
2. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
4. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T. (Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
5. Ignatia Maria Honggowati (Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);

6. Achmad Tossin Sutawikara (Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia);
7. Supari (Direktur Bisnis Mikro BRI);
8. Ahmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Jaringan dan Layanan BRI);
9. Donsuwan Simatupang (Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri);
10. Firman (AVP BTN);
11. Tambok (BNI);
12. Muin (BNI);

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PUKUL: 13.02 WIB)

ANGGOTA DPR RI:

Harus dipikirkan Pimpinan dari mana yang lainnya

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saya minta salah satu Anggota damping saya karena minimal harus dua Pimpinan di depan.

ANGGOTA DPR RI:

Penjelasan Pak, ini Pimpinan kemana cuma sendiri Pak Sudin? Pimpinan yang lain Pak kenapa Pak Sudin yang hadir gitu Pak. Perlu ada penjelasan ini Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Perlu saya jelaskan? Jadi teman-teman semuanya

Anggota Komisi IV yang terhormat

Wakil Pimpinan saat ini sedang menghadiri COP ke 25 di Madrid. Saya pulang duluan dikarenakan ada rapat hari ini. Mereka pulang nanti selesai penutupan tanggal 13 Desember. Saya maklumi lah, sudah bisa kita mulai?

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

**Yang terhormat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kepala Badan Penyuluh dan Sumber Daya Pertanian,**

**Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian beserta jajaran,
Yang terhormat Deputi Dua Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama atau yang mewakili PT. Pupuk Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Ketua Himpunan Bank Bank Negara beserta jajaran serta hadirin yang kami hormati.**

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya dan hidayah kita dapat mengadakan rapat dengar pendapat ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2019 dan keputusan rapat internal pada tanggal 31 Oktober 2019 pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Direktur Utama atau yang mewakili PT. Pupuk Indonesia dan Ketua Himpunan Bank-Bank Negara dalam rangka membahas pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam menghadapi musim tanam, evaluasi pelaksanaan program kartu tani beserta lainnya.

Jadi Bapak Ibu pupuk ini selalu jadi masalah nanti biar teman-teman Komisi IV menyampaikan permasalahan pupuknya karena kebetulan Anggota Komisi IV sebagian besar baru jadi kalau dikomplain oleh petaninya pasti mereka belum bisa menjawab. Nanti tolong dijawab juga baik dari Kementerian Pertanian maupun dari *holding* pupuk dikarenakan memang alokasinya tidak cukup.

Bapak Ibu yang kami hormati

Menurut laporan sekretaris Komisi IV saat ini rapat dengar pendapat Komisi IV telah dihadiri dan ditanda tangani 31 Anggota dari 54 Anggota terdiri dari 9 Fraksi, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 246 dan Pasal 251 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia rapat dengar pendapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: TERBUKA)

Rapat dengar pendapat ini dimulai pada pukul 13.30 dan akan diakhiri pada pukul 16.30. Apabila belum selesai, rapat dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat 1 peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pengantar Ketua Rapat

2. Penjelasan Ditjen Kepala Badan Dirut PT. Pupuk Indonesia dan Himbara terhadap agenda rapat.
 3. Tanggapan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 4. Jawaban Dirjen, Kepala Badan, Dirut Pupuk dan Himbara.
 5. Kesimpulan rapat.
 6. Penutup.
- Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Padahal tadi sudah makan siang, tapi nampak masih pada lemas ini Anggota ini.

Hadirin yang berbahagia.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi, budidaya secara tepat dan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Sarana produksi mempunyai peranan penting dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian antara lain pupuk. Pupuk adalah salah satu faktor *input* yang berperan dalam untuk mendapatkan produktivitas pertanian sehingga Pemerintah selalu mengalokasikan anggaran yang sangat besar sekali melalui kebijakan pupuk bersubsidi bagi para petani dalam rangka memperoleh pupuk yang berkualitas. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah belum menjamin. Saya tegaskan lagi besarnya subsidi yang diberikan oleh Pemerintah belum menjamin pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan dengan baik. Kebijakan pupuk bersubsidi yang dijalankan Pemerintah dalam implementasinya masih menimbulkan banyak permasalahan diantaranya kesulitan mengakses pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk yang disebabkan kurang validnya data. Saya tegaskan lagi kurang validnya data karena di Indonesia yang masalah adalah selalu masalah data, antara satu Kementerian dengan Kementerian lain satu Direktur Jenderal dengan Direktur Jenderal lainnya pasti berbeda. Maka Pemerintah Presiden Jokowi meminta pada waktu itu satu badan untuk mengenai data tersebut.

Rencana *definitive* kebutuhan kelompok atau RDKK, penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk, penimbunan penjualan di luar wilayah distribusi serta kurang efektifnya kinerja Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida dalam segi pengawasan. Pemerintah berupaya memperketat jalur distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani harapannya proses tersebut dapat terintegrasi secara *online*, diketahui secara *realtime* sehingga proses distribusi pupuk bersubsidi dapat dipantau secara langsung. Namun itu pun pelaksanaannya *didelay* masih menghadapi beberapa tantangan antara lain seperti pendataan petani dan pendataan kebutuhan pokok. Hal ini yang menjadi perhatian khusus dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mengingat adanya perubahan luas baku lahan sawah menjadi 7,1 juta hektar, validasi data menjadi penting karena terkait dengan keberhasilan kartu tani dan pupuk bersubsidi secara keseluruhan. Kendala lainnya semua petani terdata dalam program kartu tani yang lupa pin-nya. Mohon maaf karena maklum kan kita petani kan

umumnya kerjanya di sawah, jadi pinnya sering lupa. Masih terjadi praktik penembusan secara manual dan terdapat kios non resmi yang menjual pupuk bersubsidi. Kartu tani yang didistribusikan kepada petani juga belum seluruhnya dapat digunakan dengan baik karena belum efektif dan sebagian terisi alokasi. Selain itu belum seluruh kios pupuk bersubsidi mendapatkan mesin EDC (*Electronic Data Chapter*) dan permasalahan teknis lainnya antara lain kendala sinyal. Kalau di kampung kan rata-rata masih pakai manual belum yang namanya *wifi* kan belum semua tempat ada. Kedua juga masalahnya listrik di kampung kami terutama itu seperti makan obat, satu hari tiga kali mati lampunya.

Bapak Ibu yang kami hormati

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyadari untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi tidak bisa hanya dikaji secara parsial melainkan harus secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berpengaruh, dari sektor hulu hingga hilir. Sehingga pada rapat dengar pendapat hari ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengundang pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dari hulu hingga hilir. Sehubungan dengan hal tersebut pada rapat dengar pendapat hari ini, Komisi IV meminta para mitra memberikan pandangannya, masukan ataupun solusi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dalam upaya menjamin ketersediaan pupuk yang berkualitas dan berimbang kepada petani.

Jadi Anggota Dewan jangan hanya bisa komplain, tetapi juga berikan masukan karena setiap wilayah, beda wilayah beda pula kearifan lokalnya.

Bapak Ibu yang terhormat

Demikian pengantar yang kami sampaikan selanjutnya kami persilakan kepada Dirjen, Kepala Badan, Dirut PT. Pupuk Indonesia dan Himbara untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut diatas.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Ya Silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih.

Mohon kita karena kan ini kalau berbicaranya pupuk. Kita tentu ketidakhadirannya Dirut, juga ada beberapa Dirut juga tidak hadir dari produsen, ada (suara tidak jelas) dari Petro hadir atau tidak? Butuh diabsen Ketua. Kalau tanpa alasan kehadirannya tentu sesuai kesepakatan kita, kita berhentikan rapat ini dan kita gantikan dengan waktu yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Haerudin saya belum menyampaikan. Ini ada surat kuasa dari Direktur Utama Holding Pupuk. Yang bersangkutan dengan beberapa Dirut sedang ada urusan yang tidak bisa diwakilkan dan saya juga tidak etis rasanya kalau mengumumkan di sini. Nanti saya jelaskan kepada Anggota. Setuju ya Pak? Ini surat kuasanya.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Menunggu waktu saja Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Menunggu waktu karena kalau waktunya sampai jam berapa saya nggak tahu. Kalau perlu hari ini kita minta penjelasan, nanti Januari 2020 ya kita panggil lagi karena ini musim tanam sudah hampir tiba. 2019 akhir ini musim tanam sudah mulai tiba. Nanti kalau kurang puas tanggal 13 Januari kita buka masa sidang kita panggil lagi, setuju? Jelas? Kalau rapat ini kita stop, kartu tani ini nggak bakal jalan nanti untuk masa tanam ini. Nanti yang disalahkan ya kita juga, yang disalahkan Pemerintah, cq Kementerian Pertanian, pabrik-pabrik pupuk termasuk Anggota Komisi IV yang dianggap tidak pro terhadap petani, bagaimana teman-teman lain? Ya Silakan.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Menanggapi *tektok* yang disampaikan Pak Ketua dengan Pak Haerudin, ini menarik juga sebenarnya. Kita ini pada periode perencanaan dalam masa awal, sering saya inginkan bahwa pada masa perencanaan awal ini kita harus mengungkap perencanaan kita ini secara komprehensif dari keterlibatan para pihak yang juga bentuk komprehensif. Supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita perkuat itu betul-betul bisa dikerjakan. Nah kalau misalnya ada para pihak yang tidak dapat hadir di sini saya pikir hasil rencana kita nanti juga tidak komprehensif. Jadi saya sangat realistis apa yang disampaikan oleh Pak Haerudin ini realistis. Nah kita bukan berarti bahwa dengan menunda itu kita tidak mendukung program pertanian, bukan itu maknanya. Jadi kita lebih memberikan suasana bahwa sebuah perencanaan kita yang kita susun ini apalagi berkaitan dengan pupuk. Pupuk ini problemnya hampir setiap saat dikeluhkan oleh Petani. Nah kita ingin lihat komprehensivitas dari pihak keterlibatannya seperti apa, kalau misalnya tidak hadir mungkin nanti perencanaan pelaksanaannya akan bermasalah begitu. Saya pikir kalau misalnya ditunda pun saya pikir bukan berarti kita harusnya menyelesaikannya. Kan masih ada waktu hari jumat, hari senin begitu kan, demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Hari jumat itu Bapak sudah ke Jawa Timur, kunjungan kerja. Silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Di sebelah kiri Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya kira kita sudah hadir di sini dan waktu ini sangat penting untuk kita manfaatkan dan terus terang juga saya kecewa dengan tidak hadirnya Direktur Utama. Akan tetapi ada surat kuasa yang diberikan oleh yang mewakili, saya kira dengan surat kuasa penuh itu akan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Anggota Dewan. Sebentar, dan saya sependapat kalau berulang terus dia tidak hadir saya kira perlu pandangan lain yang kita berikan kepada Direktur yang bersangkutan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua bahwa ada alasan yang sangat tidak bisa dihindari sehingga tidak bisa hadir, saya kira kita juga harus bisa sedikit memaklumi kondisi itu. Di satu sisi kebutuhan petani dan kebutuhan kita semua, waktu yang mendesak kita sebentar lagi kita akan melakukan kunjungan ke Dapil, saya kira dengan kehadiran kita di sini saran saya Pak Ketua dapat dilanjutkan.

Terima kasih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, sebetulnya aku maklum dengan apa yang disampaikan para senior semua jelas. Tetapi ingin kami sampaikan bahwa kita hadir disini juga karna kita tau wakil punya kewajiban dan kita ingin pupuk itu beres. Bukan hanya kepedulian itu tugas kita mandatori Undang-Undang sebagai DPR dan DPR itu lembaganya itu setingkat Presiden, Ketua. Apa yang kita sering sampaikan kami ini bukan jongos, kami dipilih rakyat. Saya selalu mendengar bahasa Ketua dulu, dulu tapi itu dulu, nggak tau sekarang. Hari ini ingin saya sampaikan sebetulnya, apapun mereka alasan Kapoksi kita bisa panggil ini tidak hadir ini Kepala Direktur ada apa sebetulnya? Direktur tidak hadir ini semua. Ya Dirut, ada Direktur Perusahaan Kujang, ada Petro. Nah itu lah yang ingin kami sampaikan jadi kalau pernyataan yang tadi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Sudah cukup Pak Haerudin, cukup, stop dulu. Tadi Pak Haerudin mengatakan saya akan bicara dengan Kapoksi, coba tunjuk tangan yang Kapoksi ada beberapa orang di sini? Dua? Yang lainnya? Tiga, empat, lima. Kita skors dulu rapat Poksi? Ya? Oke jadi kita nggak usah debat panjang yang penting kita.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pak Sudin, Pimpinan? Saya mungkin sebagai orang tua ya. Pertama, kita harus ada saling pengertian diantara kita, saya rasa tidak perlu ada skors untuk rapat Kapoksi. Sabagaimana lazimnya dalam rapat-rapat seperti ini kalau memang ketidakhadiran itu sudah ada surat yang memberikan mandat sebaiknya sejelek apapun surat itu dibacakan kepada forum. Itu risiko dan konsekuensi daripada pemberian daripada penugasan kepada wakil. Kalau nanti ini kita diskusi lagi diskors kemudian Kapoksi juga tidak lengkap, *deadlock* lagi nanti juga menimbulkan masalah. Saya pikir kita harus hormati juga yang sudah datang ke sini. Dan kemudian ini menjadi peringatan kita bersama bahwa yang akan datang mohon dari Pemerintah maupun dari BUMN juga sangat serius untuk menyikapi dari pada rapat-rapat seperti ini. Kalau memang dari BUMN

Dirutnya tidak menganggap penting lebih baik mengundurkan diri jadi Dirut. Ini lembaga negara yang setara dengan Kepresidenan. Kami punya hak kalau perlu dalam rapat ini kita evaluasi bahwa Dirut ini tidak hadir diundang rapat kita sampaikan kepada saudara Erick Tohir, supaya untuk mengevaluasi. Jadi saya rasa Pak Sudin selaku Pimpinan Rapat, dibacakan saja sejelek apapun bunyi surat itu tidak ada etika-etikaan buka saja kita bacakan dan kita lanjutkan supaya kita mengemat waktu. Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Firman, cukup.

Di sini tidak dijelaskan kenapa ketidakhadiran hanya memberikan kuasa, Direktur Utama memberikan kuasa kepada Direktur Pemasaran. Nanti kenapa tadi saya menyutujui skors 5 menit akan saya jelaskan kenapa tidak hadir. Jelas? Oke saya skors 5 menit.

(RAPAT: DISKORS)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bapak Ibu, skors saya cabut.

Jadi silakan dijelaskan, dipimpin oleh siapa? Dirjen PSP? Silahkan Pak Dirjen, setelah penyampaian Dirjen, Holding Pupuk, Himbara, kita pulang. Nanti kita jadwalkan kemungkinan kami jadwalkan lagi secara detail kalau tidak ada halangan rencana hari senin siap. Jadi nanti kita pemaparan Senin siang nanti kita panggil kembali rencananya. Karena senin siang itu, eh senin pagi kita dengan Badan Pengelolaan Kelapa Sawit selesai itu mungkin dijadwalkan dengan pupuk dan selasa kita sudah tutup masa sidang. Silakan Pak Dirjen PSP karena yang kita tahu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi untuk masalah pupuk subsidi, silakan.

**DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN
PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan kami muliakan,
Direksi Pupuk Indonesia, Dirut PNI, Dirut Mandiri dan Dirut BRI serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati.**

Terima kasih atas undangannya. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan kebijakan, arah kebijakan pupuk bersubsidi dan kartu tani. Bapak Pimpinan, kami sampaikan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan belanja pupuk bersubsidi adalah kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran dan efisien tentunya.

Pertama, kondisi saat ini memang berkaitan dengan data masih banyak yang duplikasi. Kemudian juga ada kasus orangnya sudah meninggal tapi RDKNya masih ada masih terdaftar, kemudian verifikasi masih manual. Untuk tahun 2020 ini, untuk semua usulan RDKN menggunakan RDKN dengan pendataan dengan NIK Pak, Nomor Induk Kependudukan. Kemudian rencana penebusannya itu melalui kartu tani dan sudah berjalan di beberapa lokasi sehingga ke depan mudah-mudahan dalam penyaluran atau penebusan pupuk subsidi ini akan lebih tepat sasaran. Berkaitan dengan usulan RDKN ini, kebijakan yang sudah berjalan yaitu RDKN disusun oleh para petani kemudian dihipunkan oleh kelompok tani, dari kelompok tani direkap dan divalidasi ditingkat BPP kemudian di tingkat Dinas Pertanian Kabupaten, dari Dinas Pertanian Kabupaten ke Provinsi dan dari Provinsi disampaikan ke Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kemudian kami memverifikasi dan mevalidasi dan kami kembalikan ke Provinsi sebagai kuota berdasarkan jumlah RDKN tersebut dari Provinsi ke Kabupaten dan mengalokasikan ke tingkat desa dan kecamatan. Kemudian berdasarkan Permentan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, di sana disebutkan bahwa di Pasal 5 ayat 2 pupuk bersubsidi diperuntukan untuk sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya. Kemudian di ayat 2 nya, pupuk bersubsidi untuk petani yang telah berkelompok dan menggarap lahan paling luas 2 hektar. Dan di Pasal 13 ayat 2 nya penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani. Mengapa di sini dapat? Karena sosialisasi kartu tani ini baru selesai tahun 2019. Jadi tahun 2018 kami sudah melakukan sosialisasi untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan sisanya di tahun 2019. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2020 sudah efektif dilaksanakan. Lanjut.

Di sini kami sampaikan, jadi manfaat penggunaan kartu tani ini dari sisi administrasi penagihan tentunya lebih *simple* karena tidak perlu nota penjualan, tidak perlu *lockbook*, tidak perlu lagi menyimpan RDKN di kios dan tidak perlu berita acara verifikasi dan validasi. Jadi ini akan lebih apa namanya *simple*, kemudian waktu penagihan juga akan lebih singkat karena cukup dengan *print out* dari *dashboard* penyaluran pupuk bersubsidi, rekapitulasinya bisa per wilayah, bisa per provinsi atau per kabupaten. Maka dengan surat pengantar dari Pupuk Indonesia itu sudah bisa langsung dipertanggungjawabkan dan dibayarkan. Ketepatan sasaran penerima lebih terjamin tentunya karena dengan penebusan pupuk bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh pemegang kartu. Memang dalam 2019 ini sudah lebih kurang 600.000 yang jalan beberapa kendala diantaranya pin nya lupa, pin nya terselip kemudian sinyal. Ini yang paling banyak itu berkaitan dengan sinyal, tapi kami sudah komunikasi dengan Kementerian Komunikasi (Kominfo) akan diupayakan penguatan sinyal di titik-titik yang memang sinyalnya lemah. Kemudian kartu tani ini kita definisikan yaitu kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Captured* pengecer resmi. Kemudian *EDC* itu kita definisikan sebagai mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukan atau menggesek kartu di pengecer resmi. Lanjut.

Prosesnya ini ada beberapa tahap jadi usulan pupuk dari kelompok tani ini berdasarkan RDKN. Kemudian RDKN ini dihipunkan ditingkat kecamatan BPP,

kemudian diverifikasi ditingkat Kabupaten dengan sistem elektronik RDKK. Kemudian pihak bank itu mengakses ya, mengakses *database* RDKK ini untuk selanjutnya divalidasi dan diterbitkan kartu taninya serta ada pengadaan di bank bersangkutan ini sementara ini ada BNI46, ada Bank Mandiri dan BRI mengadakan *EDC* dan disampaikan ke kios-kios. Lanjut.

Ini data RDKK pertanggal 26 November 2009. 2019 ini RDKK yang masuk ini ada totalnya 10.787.914 yang mengusulkan ke kita. Kemudian.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Pak Dirjen, saya tanya sedikit. RDKK ini kan usulan dari Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi. Apa dijamin validasinya? Karena kan kita tahu sendiri kebanyakan merekan kan cuma pakai *copy paste*.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Jadi memang sebelum menggunakan NIK ya, nomor induk kependudukan itu banyak memang yang duplikasi dan yang sudah meninggal pun RDKK nya ada gitu Pak. itu terjadi di beberapa desa kemudian di 2020 ini basisnya kita Nomor Induk Kependudukan mudah-mudahan akan lebih baik Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bukan masalah NIK atau tidak NIKnya, siapa yang menjamin itu adalah petani? Karena kan RDKK kan umumnya kan di kecamatan kan hanya *copy paste*, penambahan. Nggak ada pengurangan, yang namanya pupuk subsidi tidak pernah ada pengurangan selalu ada penambahan. Ini yang kadang-kadang yang berhak menerima nggak dapat. Dan saya pun mohon maaf ini saya masih meragukan kartu tani ini. Kalau kartu tani ini dipegang oleh kios bisa nggak? Bisa. Dah kartu tani ini semua dikumpulkan ini mana satu kecamatan saya kumpulkan semua kamu terima uang sekian. Nah ini perlu pengawasan lagi yang jelas ya, lanjutkan.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Baik, Bapak Pimpinan.

Jadi memang verifikasi ini sebetulnya berlapis ada di BPP dan Dinas Kabupaten dan Dinas Provinsi mudah-mudahan kedepan bisa lebih tertib. Lanjut. Kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa dari 10,78 juta ini kartu tani yang sudah dibuatkan oleh tiga bank tersebut ada 5,6 kartu tani. Kemudian yang digunakan itu baru 10% nya itu ada 571.000 kartu tani yang sudah efektif digunakan. Ini pun betul seperti Bapak Pimpinan sampaikan, bahwa petani menggeseknya itu belum bisa gitu tapi digesekkan oleh kios begitu. Jadi kadang dikumpulkan di kios, kios yang menggesekkan baru para petani yang membayar tunai. Lanjut.

Ini siapa yang melakukan jadi memang kaitan dengan NIK ini di sini ada penyuluh nanti Kepala Badan SDM mungkin akan menambahkan kaitan dengan penyuluh dalam program kartu tani ini. Kemudian dari apa namanya Kementerian

Keuangan dari sisi anggarannya. Kemudian untuk infrastruktur *input* RDCK juga kita melibatkan penyuluh. Kemudian penyiapan anggaran infrastruktur komputernya dan jaringan internet juga dari Kementerian Keuangan. Kemudian di sini ada apa perbankan terkait dengan *EDC* dan kartu taninya. Kemudian dari sisi penebusan kartu tani ada operatornya di sini menyiapkan jaringan internet ke seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi penebusan kios di sini untuk melakukan penyuluhan kepada petani dari penyuluh kemudian dari PIHC dari Pupuk Holding dan anak perusahaannya. Peran penyuluh dan PIHC ini sangat penting terutama berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan kartu tani ini. Kami berpikir bahwa kalau misalnya dari PIHC bisa menekan distributor untuk segera melakukan program ini mungkin akan lebih cepat terealisasi minimal penebusan pupuknya akan lebih baik dan tepat sasaran.

Kemudian berkaitan dengan koordinasi antarlembaga juga kami lakukan karena sudah 3 kali rapat dengan Menko Perekonomian dengan mengundang Kementerian Pertanian berkaitan dengan alokasi pupuk. Kemudian Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan data NIK. Kemudian Kementerian Keuangan dari sisi anggaran. Kemudian Kementerian BUMN hadir juga Himbara yaitu PT. Pupuk Indonesia dan operator telekomunikasi. Kemudian Kementerian Perdagangan dari distribusi dan pengawasan dan Kementerian Perindustrian dari sisi mutu pupuk dan di sana disepakati bahwa yang akan mengkoordinasikan itu adalah Kementerian Perekonomian. Lanjut,

Ada kesepakatan penetapan target dan tindak lanjut percepatan program kartu tani ini yang ditetapkan oleh Kementerian Perekonomian. Yang pertama, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan payung hukum penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani, kemudian koordinasi dan sinkronisasi *roadmap* perencanaan aksi program kartu tani 2020-2024, kemudian koordinasi dan sinkronisasi komitmen Kepala Daerah terkait dengan dukungan terhadap implementasi pelaksanaan kartu tani dan tentunya sosialisasi penggunaan kartu tani kepada para pihak secara berkesinambungan.

Kami sampaikan bahwa sebetulnya sosialisasi kartu tani ini sudah kami laksanakan sejak 2018, 2018 itu kami sosialisasi untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, kemudian 2019 sisanya. Jadi sebetulnya untuk sosialisasi kartu tani untuk seluruh wilayah Indonesia sudah selesai dan kami juga mengharapkan di 2020 ini bisa efektif dilaksanakan Bapak Pimpinan, mohon dukungannya. Mudah-mudahan secara bertahap kita bisa laksanakan. Kami berkaca waktu *e-toll* dulu ragu masyarakat ternyata dalam 2 tahun sudah selesai semua. Mudah-mudahan kartu tani pun bisa dilaksanakan tahun 2020, 2021 sudah selesai. Jadi lebih cepat yang direncanakan oleh Menko Perekonomian. Kemudian juga kami sudah melakukan MOU dengan BNI, kemudian dengan Mandiri dan dengan BRI. Jadi wilayah-wilayah sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara ketiga bank tersebut ini wilayahnya dan mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan. Kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan ketersediaan pupuk saat musim tanam perlu kami sampaikan bahwa RDCK PS alokasi, PS realisasi ini. Jadi di sini kami buat apa namanya bagan yang biru yang biru itu kebutuhan pupuk berdasarkan RDCK Bapak Pimpinan. Kemudian yang warna oranye itu berdasarkan alokasi dan yang warna abu-abu itu berdasarkan realisasi. Jadi memang kalau kita mengikuti usulan itu memang banyak sekali namun realisasinya dari tahun ke tahun itu paling tinggi itu 9,2 juta ton. Ini contoh

misalnya untuk urea, untuk urea ini usulan RDKK 2018 6 juta ton, kemudian alokasi 4,2 juta ton dan realisasi 4,1 juta ton. Begitu juga ZA, SP-36 dan NPK, NPK ini contoh 2018 berdasarkan usulan RDKK ada 5,8 juta. Kemudian kita alokasi 2,7 juta dan realisasi 2,6 juta ton. Lanjut.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Saudara Dirjen, tadi kan RDKKnya, balik lagi, tolong mundur. Contohnya 2017 RDKK nya atau 2018 RDKK nya 6.052.000, realisasinya 4.111.980. jadi teman-teman Anggota nanti bertanya, nggak, dengar dulu saya ngomong dong Pak. Teman-teman nanti kalau pas pulang ke Dapil pasti ditanya, kok saya nggak dapat pupuk subsidi? Nah yang 2 juta nya lebih itu, bukan nanti Dirjen menjelaskan dulu kok kenapa yang 2 juta ini nggak ada realisasi nggak mendapat subsidi? Oh mungkin Pemerintah menyiapkan dananya cuma sekian triliun maka tidak dapat maksud saya nanti dijelaskan. Jadi Bapak Ibu pulang ke kampung bisa menjawab bahwa Pemerintah alokasinya cuma sekian, tolong dijelaskan dulu saudara Dirjen.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dr. SARWO EDHY, S.P., M.M.):

Siap, iya. Jadi mohon izin Pimpinan, contoh untuk urea itu berdasarkan usulan RDKK itu 6 juta ton kemudian kita alokasikan 4,2 juta ton namun realisasi penebusan dari para petani hanya 4,1 juta ton sampai dengan 31 Desember 2018 begitu Pak ya. Jadi ada sisa yang tidak ditebus kira-kira begitu Pak Pimpinan penjelasannya. Jadi sebetulnya kalau misal ada kelangkaan pupuk disana-sini dari di kios itu ada cadangan pupuk subsidi sebetulnya dan setiap tahun memang diaudit oleh BPK berkaitan dengan usulan RDKK kemudian alokasi dari Pupuk Indonesia dan realisasi penebusan dari kelompok petani. Lanjut.

Ini untuk pupuk organik ini berdasarkan usulan RDKK contoh di 2018, 6 juta ton kemudian alokasi kita alokasikan 736 ribu ton, kemudian realisasinya hanya 730.184 ton, ini untuk pupuk organiknya. Sehingga kami dalam mengalokasikan anggaran pupuk dan volumenya itu pertimbangannya adalah alokasi pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama memang usulan dari daerah berdasarkan RDKK kita *release* kita juga cantumkan kemudian realisasi serapan tahun sebelumnya juga kita masukan dan tentunya disesuaikan ketersediaan anggaran ini kaitan dengan apa namanya alokasi pupuk bersubsidi dan volume yang dicantumkan. Kemudian ini perhitungan kebutuhan pupuk subsidi ini kalau kita melihat dengan RDKK ini kebutuhan kita itu berdasarkan keinginan keinginan yang ditulis di dalam RDKK itu rupiahnya mencapai 47 triliun rupiah dengan volume 26.129.575, ini berdasarkan RDKK. Namun demikian kita dalam menyusun selalu mempertimbangkan realisasi 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir yang rata-ratanya ternyata hanya terserap 9,2 juta ton. Lanjut.

Nah ini DIPA 2019. Dialokasikan di dalam DIPA sebesar 9,55 juta ton dengan pertimbangan realisasi setiap tahun 3 tahun terakhir atau empat tahun terakhir paling tinggi 9,2 juta ton sehingga 2019 ini kita alokasikan 9,5 juta ton dengan anggaran 29,5 triliun rupiah. Kemudian dalam perkembangannya ada validasi lahan baku sawah dari ATR/BPN dari 7,75 juta hektar menjadi 7,105 juta

hektar. Sehingga area sawah berkurang lebih kurang 645 ribu hektar, sehingga berdampak kepada blokir anggaran pupuk yaitu lebih kurang 676 ribu ton senilai 2,174 triliun rupiah. Ini yang diblokir kemudian kita juga melihat realisasi anggaran sampai dengan 30 November. Ini untuk urea itu posisinya di 89% kemudian SP-36 93%, ZA 88% dan NPK 93% kemudian pupuk organik 71%. Jadi rata-rata 88 % ini sampai dengan akhir November.

Kemudian ini kami sampaikan juga realisasi pupuk bersubsidi 3 tahun terakhir. 2016 itu terealisasi 9,1 juta ton, 2017 9,2 juta ton dan 2018 9.289.625 ton. Selanjutnya kaitan dengan data serapan Bapak Pimpinan, ini kami juga melakukan simulasi serapan pupuk tanggal 1 sampai dengan 31 Desember, ini untuk 2016 lebih kurang 929 ribu ton kemudian 2017 976 ribu ton, 2018 928 ribu ton. Sehingga rata-rata 944.885 ribu, sedangkan angka tertinggi itu ada di 1.060.346. Ini angka tertinggi dari serapan di bulan Desember ini. Kemudian untuk kecukupan kebutuhan pupuk sampai dengan 31 Desember ini setelah kami rancang dengan PI dan kondisi lapangan itu akan kekurangan lebih kurang urea, lebih kurang 16.481 ton, kemudian SP36 5.744 ribu ton, NPK 155.977 ton, kemudian pupuk organik ini akan kelebihan 218.965 ton kemudian ZA akan kelebihan 51.149 ribu ton.

Kemudian solusi karena memang apa namanya pembukaan blokir belum dilaksanakan, jadi solusi yang pertama adalah substitusi artinya kelebihan anggaran di pupuk organik itu diupayakan untuk apa namanya membeli urea begitu ya kemudian kelebihan di ZA untuk membeli NPK. Jadi artinya ada substitusi di sana sehingga cukup sampai dengan 31 Desember 2019 ini dan per 1 Januari penebusan sudah dibebankan kepada alokasi pupuk bersubsidi 2020. Karena memang tinggal lebih kurang 18 hari kalender lagi juga kami sarankan kepada Pupuk Indonesia untuk menyiapkan pupuk non-subsidi ditingkat kios agar tidak terjadi kelangkaan pupuk. Ini salah satu solusi yang kami sarankan kepada Pupuk Holding atau Pupuk Indonesia sehingga pupuk kita yang 27 yang 8,8 juta ton dengan anggaran 27,6 triliun ini cukup sampai dengan akhir Desember 2019. Selanjutnya ini juga kami petakan alokasi dan serapan pupuk dimasing-masing kepulauan di pulau Sumatera itu urea itu sampai 30 November mencapai 93%, NPK 96%. Kemudian Kalimantan urea 87%, NPK 98%. Kemudian Sulawesi urea 95% kemudian NPK 97%. Maluku dan Papua urea 85%, NPK 94%. Kemudian Jawa dan Bali urea 86%, NPK 91% dan untuk NTB dan NTT serapannya untuk urea 93% dan NPK 96%.

Mungkin itu Bapak Pimpinan dan para Anggota yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dapat kita pahami Bersama. Tentunya kita sebagai acuan untuk pelaksanaan penyaluran dan untuk pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi di tahun 2020 tentunya akan lebih baik demikian lebih kurangnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mungkin ada tambahan dari Kepala.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Walaikumsalam

Saya rasa tidak perlu ada tambahan. Cukup Dirjen dan Himbara yang menjelaskan, karena pupuk dalam hal ini teman-teman tadi sudah setuju nanti kita bahas lagi. Jadi untuk pupuk tidak perlu ada penjelasan nanti Dirutnya ada baru dijelaskan jadi Himbara kami minta singkat saja kesiapan untuk menghadapi kartu tani karena perlu kita ingat zaman Menterinya Pak Suswono itu sudah ada kan kartu pupuk? Sudah dicoba di beberapa Kabupaten di Pulau Jawa nyatanya gagal total, betul nggak? Betul? Bapak lama kan di pupuk kan? Gagal kan? Saya tidak mau hal ini gagal lagi, jadi jadikan pelajaran yang gagal tersebut bagaimana supaya sukses, silakan Himbara.

HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA):

Terima kasih, Pimpinan,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati

Tadi sesungguhnya sudah disapu bersih oleh Pak Dirjen karena paparan kami kita sampaikan dan kita bahas bersama dengan tim dari Kementerian Pertanian dan juga teman-teman dari Pupuk Indonesia.

Yang pertama, benar Pimpinan bahwa kami telah mendapatkan penugasan untuk menggelar kartu tani kepada petani penerima yang potensinya 10 juta. Sampai dengan hari ini kami sudah gelar 52%. Kami telah bersama-sama menyusun percepatan dan tadi juga sudah disampaikan Bapak Dirjen. Oleh karena itu kami tidak mengulang kembali namun demikian ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Hari ini juga Pimpinan, kami Himbara telah menggelar infrastruktur *supportnya* berupa yang tadi disampaikan mengagenkan kios pupuk lengkap. 14.712 Pimpinan kios lengkap saat ini sudah menjadi agen bank baik itu agen BRI, agen Mandiri, dan juga agen BNI. 60% sesungguhnya telah aktif Bapak. Nah aktivasi mereka itu bisa jadi tidak hanya untuk penebusan pupuk, bisa untuk transaksi-transaksi terkait dengan layanan perbankan lainnya termasuk layanan penerimaan KUR setelah mereka pencairan KUR kemudian juga tabungan dan lain-lain. Artinya apa bahwa apa yang tadi barangkali disampaikan banyak kendala tentang petani tentang agen kami berupaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Hari ini juga kami Himbara telah juga memberikan solusi atas agen-agen yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, *blank spot* atas jaringan komunikasi. Kami dengan teman-teman Himbara lainnya sekarang telah mengirimkan 200 Bapak untuk kebutuhan agen yang seperti ini. Ini juga kami integrasikan dengan kebutuhan agen-agen terkait dengan bansos. Nah kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan, sehingga apa yang Pimpinan harapkan terkait dengan penyaluran pupuk tepat sasaran, tempat penerima, tempat waktu dan seterusnya bisa semakin baik. Selanjutnya kami sampaikan Pimpinan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan interupsi sebentar boleh?

Bukan bertanya. Masalah kartu, pernyataan kita adalah kalau ini yang membuatnya petani dan mereka mengeluarkan uang dari depositnya itu dan mereka yang dipotong, sistem ini merugikan petani.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Nanti Pak Haerudin rapat akan datang kita bedah secara tuntas, lanjutkan Pak.

HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA):

Bapak Pimpinan, kartu tani adalah produk khusus dan kami bangun spesifik dan tersendiri. Dan *Insyallah* petani gratis yah Pak Dirjen yah semuanya tidak ada biaya-biaya apa pun termasuk biaya-biaya yang lazim dipungut oleh perbankan pada umumnya terkait dengan mungkin kompensasi dari layanan kami, kira-kira begitu. Saat ini hampir mungkin 10 triliun Bapak KUR yang kami cairkan yang basisnya kartu tani. Maka yang kami harapkan adalah kalau ada intervensi barangkali kebijakan yang lebih memaksa para KPL untuk melayani mereka para petani itu akan sangat luar biasa dampaknya Pak. Efisiensi yang luar biasa menurut kami oleh karena itu supaya kami juga lebih *pede* lagi Pak karena kami kan di paling hilir ini Pak, di paling hilir ini kan haduh Pak kalau Bapak barangkali nanti bisa berkomunikasi dengan konstituen gitu bagaimana kami meyakinkan bahwa kartu itu sangat bermanfaat bagi petani. Itu perjuangan petugas-petugas kami sungguh sangat luar biasa.

Terakhir Pimpinan bahwa kami dan Himbara lainnya telah menggelar petugas-petugas hampir 30.000 kalau desa itu 78.000, 1 petugas kami itu rasanya cukup kalau menjangkau 3 desa dan mereka akan terus mengedukasi tentang kemanfaatan dan cara-cara menggunakan kartu tani. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih atas penjelasannya dari Himbara.

Jadi yang kita perlukan adalah yang paling penting juga permasalahan pengawasan. Karena kemarin saya dapat info bahwa kios-kios pupuk itu tanda kutip bermain mata juga. Termasuk distributornya bermain mata kepada kios dan mohon maaf sekali lagi saya katakan mohon maaf ada oknum juga dari pabrik pupuk yang bermain seolah-olah agennya cuman yang boleh ini, agennya ini. Ini evaluasi dari teman-teman saya minta ditinjau ulang lagi. Kalau memang agen tersebut tidak benar wajib dicabut atau tadi teman-teman mengatakan Dirutnya nanti yang dicabut atas usulan teman-teman tadi. Saya tidak mau hal itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi apabila nanti ada penyerahan kartu tani baik dari Himbara maupun PSP teman-teman Anggota Komisi IV diundang mendampingi waktu memberikan kartu taninya, ya jelas? Saya rasa cukup nanti kita jadwal ulang.

Mohon sampaikan kepada para Dirutnya wajib hadir dan ini saya melihat Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian tidak datang. Bagaimana kita mau membereskan hal-hal yang

kurang bagus, kurang baik kita jadikan lebih baik lagi begitu. Ya Bapak ya ingat Bapak Ibu semua?

Terima kasih dengan demikian berakhir sudah rapat dengar pendapat pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekurangan kekhilafan dengan mengucapkan.

Alhamdulillah rabbi'alamin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT: DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)

Jakarta, 12 Desember 2019

a.n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 196301221991031001